

## Internalisasi Etika Demokrasi Digital Berbasis Kearifan Lokal Bima dalam Penguatan Nasionalisme dan Persatuan Siswa Madrasah

Munawir Hadi <sup>a, 1\*</sup>, Marzuki <sup>a, 2</sup>, Muhammad Dodi Alfiansyah <sup>b, 3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

<sup>1</sup> munawirhadi.2025@student.uny.ac.id\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 20 November 2025;

Revised: 1 Desember 2025;

Accepted: 29 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Etika Demokrasi Digital;

Nasionalisme;

Persatuan;

Kearifan Lokal Bima;

Pendidikan Kewarganegaraan.

Ruang digital memperluas partisipasi siswa madrasah, tetapi juga memperbesar paparan hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi identitas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kecenderungan etika demokrasi digital berbasis kearifan lokal Bima dalam penguatan nasionalisme dan persatuan siswa MTsN 4 Bima. Penelitian menggunakan survei deskriptif kuantitatif terhadap 100 siswa melalui angket Likert 29 butir. Data dianalisis dengan persentase, rerata, kategori kecenderungan, dan reliabilitas Cronbach's Alpha. Hasil menunjukkan reliabilitas keseluruhan 0,941; rerata etika demokrasi digital 4,45, nasionalisme 4,53, dan persatuan 4,46, semuanya sangat tinggi. Namun, skor tinggi dibaca secara kritis karena instrumen self report berpotensi mengandung bias kepatutan sosial dan belum membuktikan perilaku digital aktual. Temuan terendah terdapat pada ketahanan terhadap ujaran kebencian, penolakan konten pemecah belah, dan pengutamaan kepentingan bersama. Nilai Maja Labo Dahu, Nggahi Rawi Pahu, dan Tahompara Ndai Sura Dou Labo Dana dapat menjadi filter etis untuk menautkan literasi kritis, kesantunan digital, nasionalisme, dan persatuan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

### ABSTRACT

**Internalization of Digital Democratic Ethics Based on Bima Local Wisdom in Strengthening Nationalism and Unity among Madrasah Students.** Digital spaces expand madrasa students' participation while simultaneously increasing their exposure to misinformation, hate speech, and identity-based polarization. This study aims to describe the tendencies of digital democratic ethics grounded in Bima local wisdom in strengthening students' nationalism and unity at MTsN 4 Bima. The research employed a quantitative descriptive survey involving 100 students, using a 29-item Likert-scale questionnaire. Data were analyzed using percentages, mean scores, tendency categories, and Cronbach's Alpha reliability test. The results indicate a high level of reliability ( $\alpha = 0.941$ ), with mean scores of digital democratic ethics (4.45), nationalism (4.53), and unity (4.46), all categorized as very high. However, these high scores should be interpreted critically, as self-report instruments are prone to social desirability bias and do not necessarily reflect actual digital behavior. The lowest scores were found in indicators related to resilience against hate speech, rejection of divisive content, and prioritization of the common good. Local wisdom values such as Maja Labo Dahu, Nggahi Rawi Pahu, and Tahompara Ndai Sura Dou Labo Dana can function as ethical filters that integrate critical literacy, digital civility, nationalism, and unity within Civic Education learning.

Keywords:

Digital Democratic Ethics;

Nationalism;

Unity;

Bima Local Wisdom;

Civic Education.

Copyright © 2025 (Munawir Hadi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Hadi, M., Marzuki, M., & Alfiansyah, M. D. (2025). Internalisasi Etika Demokrasi Digital Berbasis Kearifan Lokal Bima dalam Penguatan Nasionalisme dan Persatuan Siswa Madrasah. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(5), 216–226. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i5.4306>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menggeser pengalaman kewargaan peserta didik dari ruang fisik ke ruang jejaring. Bagi siswa madrasah, media sosial tidak lagi sekadar sarana hiburan, tetapi menjadi arena pembentukan identitas, relasi pertemanan, penilaian terhadap isu publik, dan ekspresi pendapat. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), aktivitas memberi komentar, membagikan berita, mengikuti diskusi, dan merespons perbedaan merupakan praktik kewargaan digital yang memerlukan *civic competence*: pengetahuan untuk memahami informasi, keterampilan untuk menilai dan berpartisipasi, serta disposisi untuk bertindak santun dan bertanggung jawab.

Masalah yang muncul dalam kehidupan siswa saat ini adalah tidak semua aktivitas digital disertai kemampuan etis dan kritis. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, tetapi kecepatan tersebut sering tidak diikuti pemeriksaan kebenaran. Berita viral, potongan video, meme politik, komentar provokatif, dan konten bernuansa kebencian dapat memengaruhi cara siswa memahami realitas sosial. Kajian terbaru menunjukkan bahwa remaja dan warga muda tidak hanya menghadapi persoalan akses informasi, tetapi juga tantangan dalam menilai kredibilitas sumber, mengenali misinformasi, serta mengendalikan respons terhadap konten yang bersifat emosional dan provokatif. McGrew dan Kohnen (2024) menegaskan bahwa literasi informasi daring penting untuk membantu peserta didik mengevaluasi sumber digital secara kritis, sedangkan Heiss et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi informasi media sosial berkaitan dengan kemampuan individu menghadapi kelebihan informasi, penghindaran berita, dan kecenderungan menerima narasi konspiratif. Kops et al. (2025) juga menekankan bahwa anak muda membutuhkan program pencegahan yang terstruktur agar lebih mampu merespons informasi palsu di ruang digital. Nurjanah et al. (2024) menegaskan bahwa generasi muda sebagai warga digital membutuhkan literasi kritis agar mampu menilai informasi dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Prasetyo et al. (2022) juga menekankan bahwa pemahaman kewarganegaraan digital penting diberikan kepada calon pendidik dan peserta didik karena ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan demokratis.

Dalam konteks Indonesia, persoalan etika digital tidak dapat dipisahkan dari nilai Pancasila, nasionalisme, dan persatuan. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, melainkan juga orientasi moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ruang digital. Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan perlu memperkuat kemampuan siswa untuk menghargai perbedaan, bermusyawarah, menolak ujaran kebencian, menjaga kerukunan, dan menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Sartika et al. (2022) menunjukkan bahwa materi Pendidikan Pancasila perlu disesuaikan dengan perkembangan era digital agar mampu membentuk etika peserta didik. Sunarso et al. (2024) menekankan pentingnya kurikulum Pancasila dan kewarganegaraan pada jenjang SMP dalam menegaskan identitas kewargaan peserta didik. Artinya, PPKn memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kecakapan digital dengan karakter kebangsaan.

Madrasah memiliki posisi khas dalam proses pembentukan karakter digital siswa. Sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, madrasah tidak hanya bertugas meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk akhlak, disiplin, sikap sosial, dan identitas kebangsaan peserta didik. Budaya religius madrasah dapat menjadi modal penting untuk membangun kesantunan digital karena nilai kejujuran, amanah, persaudaraan, dan larangan menyakiti orang lain memiliki relevansi langsung dengan perilaku bermedia sosial. Di sisi lain, madrasah juga perlu menguatkan wawasan kebangsaan agar siswa tidak mudah terprovokasi oleh konten digital yang memecah belah masyarakat berdasarkan agama, suku, daerah, atau pilihan politik. Ruskiyana et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi kompetensi kewarganegaraan pada jenjang SMP di Kabupaten Bima relevan untuk memperkuat pendidikan kewargaan kontekstual. Hal ini memberi dasar bahwa kajian pada MTsN 4 Bima memiliki nilai empiris dan kontekstual yang penting.

Konteks lokal Bima tidak ditempatkan sebagai ornamen budaya, tetapi sebagai sumber etika publik yang dapat mengarahkan perilaku kewargaan digital. Maja Labo Dahu membangun kontrol diri melalui rasa malu melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan takut melanggar norma agama, adat, serta kemanusiaan. Nggahi Rawi Pahu menuntut keselarasan antara ucapan dan tindakan, sehingga relevan untuk menilai tanggung jawab siswa ketika menulis komentar, mengunggah konten, atau membagikan ulang informasi. Tahompura Ndai Sura Dou Labo Dana menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ketiga nilai ini menjadi lensa analitis untuk membaca apakah nasionalisme

dan persatuan siswa berhenti pada sikap afirmatif, atau telah bergerak menjadi ketahanan kritis menghadapi provokasi digital.

Etika demokrasi digital dalam artikel ini dipahami sebagai seperangkat nilai, sikap, dan perilaku siswa dalam menggunakan ruang digital secara santun, kritis, partisipatif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada persatuan. Etika ini mencakup kemampuan menghargai perbedaan pendapat, memverifikasi informasi, menghindari ujaran kebencian, menolak provokasi SARA, menjaga privasi, mengutamakan musyawarah, dan menggunakan media digital untuk kegiatan positif. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berpendapat tidak berarti kebebasan menyerang martabat orang lain. Kebebasan perlu disertai tanggung jawab. Wahidin et al. (2025) menjelaskan bahwa transformasi demokrasi digital di Indonesia menghadirkan peluang partisipasi sekaligus tantangan etika dan kualitas demokrasi. Pemahaman tersebut sejalan dengan kajian digital citizenship yang menempatkan ruang digital sebagai arena pembentukan tanggung jawab, etika, partisipasi, dan kesadaran demokratis warga muda. Ananto dan Ningsih (2023) menunjukkan bahwa digital citizenship pada guru dan siswa Indonesia perlu dipahami melalui dimensi etika, literasi, keamanan, dan partisipasi digital. Japar et al. (2024) juga menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di era virtual perlu membekali siswa dengan kemampuan menjaga privasi, menghargai hak orang lain, serta menghindari penyebaran berita palsu. Sementara itu, Peart et al. (2022) dan Vallès-Peris et al. (2024) menempatkan keterampilan sosial kewargaan dan kesadaran demokratis sebagai bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan digital di sekolah.

Penelitian tentang literasi digital, kewarganegaraan digital, dan pendidikan karakter telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Azis et al. (2021) mengaitkan pendidikan kewarganegaraan era Covid-19 dengan pembentukan warga digital. Halimah et al. (2024) menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran kewarganegaraan daring. Chotimah et al. (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan berbasis HOTS secara daring dapat membangun karakter religius, jujur, disiplin, dan rasa ingin tahu. Kecenderungan tersebut juga tampak dalam literatur internasional yang lebih banyak menempatkan digital citizenship sebagai kerangka pengukuran kompetensi digital, literasi digital, dan literasi media, sementara keterhubungannya dengan nilai lokal, nasionalisme, dan persatuan siswa madrasah masih jarang dibahas secara spesifik (Fernández-Prados et al. 2021; Milenkova & Lendzhova, 2021; von Gillern et al. 2024). Dengan demikian, artikel ini mengisi celah kajian dengan menghubungkan etika demokrasi digital, kearifan lokal Bima, nasionalisme, dan persatuan dalam konteks siswa MTs.

Gap penelitian artikel ini ditegaskan pada tiga lapis. Pertama, kajian literasi digital umumnya menekankan akses, kecakapan teknis, dan kemampuan mengevaluasi informasi, sedangkan etika demokrasi digital memerlukan analisis yang menghubungkan kebebasan berekspresi, tanggung jawab moral, kesantunan dialog, dan kepentingan persatuan. Kedua, penelitian kewarganegaraan digital lebih sering membahas sekolah umum, mahasiswa, atau calon guru, sementara madrasah memiliki lingkungan religius dan sosial-budaya yang berbeda. Ketiga, nilai lokal Bima jarang dibaca sebagai perangkat etika untuk menghadapi algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten emosional, identitas kelompok, dan polarisasi. Dengan demikian, kontribusi artikel ini bukan membuktikan efektivitas program, melainkan memetakan kecenderungan sikap siswa dan menunjukkan titik kritis yang perlu dibina dalam PPKn.

State of the art artikel ini terletak pada pembacaan etika demokrasi digital melalui tiga jembatan: nilai Pancasila sebagai dasar kewargaan, kearifan lokal Bima sebagai filter moral kontekstual, dan data kecenderungan siswa sebagai pijakan empiris awal. Karena penelitian ini bersifat survei deskriptif satu waktu, kebaruan tersebut harus dipahami secara proporsional. Artikel ini tidak mengklaim bahwa nilai lokal telah terbukti mengubah perilaku digital siswa, tetapi menunjukkan bahwa nilai tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan perbedaan kekuatan antarindikator dan merumuskan agenda pembinaan yang lebih terarah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kecenderungan internalisasi etika demokrasi digital berbasis kearifan lokal Bima dalam penguatan nasionalisme dan persatuan siswa MTsN 4 Bima. Secara khusus, artikel ini membahas kecenderungan etika demokrasi digital siswa, kecenderungan nasionalisme dan persatuan, indikator yang paling kuat dan indikator yang masih perlu diperkuat, serta implikasi pedagogis bagi pembelajaran PPKn dan pembinaan karakter digital di madrasah. Rumusan ini disesuaikan dengan desain penelitian deskriptif, sehingga hasil

penelitian tidak diarahkan untuk membuktikan pengaruh, hubungan kausal, atau efektivitas program tertentu.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain survei *cross-sectional* untuk memetakan kecenderungan etika demokrasi digital, nasionalisme, dan persatuan siswa dalam satu periode pengukuran tanpa menguji hubungan kausal atau efektivitas perlakuan. Populasi terjangkau adalah siswa MTsN 4 Bima yang berada pada fase remaja awal dan telah memiliki pengalaman menggunakan media digital, dengan sampel sebanyak 100 siswa yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria pengalaman digital dan kesesuaian konteks madrasah. Pengumpulan data dilakukan pada 24–26 April 2026 menggunakan angket tertutup berbasis skala Likert lima tingkat yang memuat 29 butir pernyataan, terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu etika demokrasi digital (10 butir), nasionalisme (9 butir), dan persatuan (10 butir), dengan indikator yang mencakup kesantunan digital, literasi kritis, penghargaan terhadap perbedaan, kecintaan terhadap bangsa, serta sikap toleransi dan solidaritas. Validitas instrumen ditentukan melalui validitas isi dan konseptual dengan menelaah kesesuaian antara konstruk teoretik, indikator, dan butir pernyataan, meskipun penelitian ini belum menggunakan analisis faktor eksploratori maupun konfirmatori. Analisis data dilakukan melalui pemberian skor (1–5), distribusi frekuensi, persentase, rerata, kategori kecenderungan (sangat rendah hingga sangat tinggi), perbandingan deskriptif antardimensi, serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha untuk mengukur konsistensi internal instrumen. Karena berorientasi deskriptif, hasil penelitian ditafsirkan sebagai kecenderungan sikap berbasis *self-report* dan tidak merepresentasikan perilaku aktual maupun hubungan kausal antarvariabel, sementara istilah internalisasi digunakan sebagai kerangka pedagogis dalam membaca implikasi temuan bagi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian disajikan dengan menempatkan data angket sebagai dasar utama. Uraian difokuskan pada profil responden, reliabilitas instrumen, kecenderungan etika demokrasi digital, nasionalisme, persatuan, indikator terkuat, indikator yang masih perlu diperkuat, serta implikasi pedagogis bagi pembinaan karakter digital di madrasah. Karena data yang dikumpulkan hanya berupa angket tertutup, pembahasan tentang peran guru, budaya madrasah, BK, OSIM, orang tua, dan media sosial madrasah tidak diperlakukan sebagai temuan lapangan langsung, melainkan sebagai implikasi pedagogis yang perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian kualitatif atau evaluatif.

Tabel 1. Profil Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Perempuan	57	57%
Jenis kelamin	Laki-laki	43	43%
Usia	12 tahun	9	9%
Usia	13 tahun	41	41%
Usia	14 tahun	40	40%
Usia	15 tahun	10	10%
Rombongan belajar	Kode 73	13	13%
Rombongan belajar	Kode 74	15	15%
Rombongan belajar	Kode 75	9	9%
Rombongan belajar	Kode 81	19	19%
Rombongan belajar	Kode 82	22	22%
Rombongan belajar	Kode 83	22	22%

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh siswa perempuan sebanyak 57% dan siswa laki-laki sebanyak 43%. Mayoritas responden berada pada rentang usia 13-14 tahun, yaitu 81% dari keseluruhan responden. Komposisi ini penting karena usia remaja awal merupakan fase ketika siswa mulai aktif membangun identitas diri, relasi pertemanan, dan kebiasaan bermedia digital. Pada fase ini, pengaruh teman sebaya, konten viral, dan pola komunikasi daring dapat membentuk cara

siswa memahami perbedaan, otoritas, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pembinaan etika demokrasi digital perlu dilakukan sejak jenjang madrasah tsanawiyah agar siswa tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga warga muda yang mampu menimbang dampak sosial dari tindakan digitalnya.

Data lapangan berasal dari 100 siswa MTsN 4 Bima. Angket dikumpulkan pada 24-26 April 2026 dan memuat 29 butir pernyataan yang merepresentasikan tiga dimensi utama. Uji reliabilitas internal menunjukkan Cronbach's Alpha keseluruhan sebesar 0,941. Secara rinci, dimensi etika demokrasi digital memperoleh Alpha 0,832, dimensi nasionalisme memperoleh Alpha 0,873, dan dimensi persatuan memperoleh Alpha 0,880. Nilai tersebut menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik untuk analisis deskriptif. Namun, karena instrumen berbentuk self report, hasil yang tinggi tetap perlu dibaca secara hati-hati karena responden dapat memilih jawaban yang dianggap paling baik secara sosial.

Sebaran responden dari enam rombongan belajar memberi gambaran bahwa data tidak hanya berasal dari satu kelompok kelas. Meskipun demikian, penelitian ini tidak mengklaim representasi statistik seluruh siswa MTsN 4 Bima karena teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Kekuatan data terletak pada kesesuaiannya dengan tujuan deskriptif, yaitu memotret kecenderungan sikap siswa yang memiliki pengalaman menggunakan media digital. Dengan demikian, interpretasi hasil perlu diarahkan pada peta kecenderungan dan kebutuhan pembinaan, bukan pada generalisasi populasi yang luas.

**Tabel 2.** Rekapitulasi Respons Angket Berdasarkan Dimensi

Dimensi	Butir	Rerata	SS + S	RR	TS + STS	Kategori
Etika demokrasi digital	10	4,45	95,5%	4,1%	0,4%	Sangat tinggi
Nasionalisme	9	4,53	96,2%	3,3%	0,4%	Sangat tinggi
Persatuan	10	4,46	93,9%	5,3%	0,8%	Sangat tinggi
Keseluruhan	29	4,48	95,1%	4,3%	0,6%	Sangat tinggi

Berdasarkan Tabel 2, keseluruhan respons siswa menunjukkan kecenderungan sangat positif. Dari 2.900 respons Likert yang terkumpul, 53,1% berada pada pilihan sangat setuju, 42,0% setuju, 4,3% ragu-ragu, 0,4% tidak setuju, dan 0,2% sangat tidak setuju. Rerata keseluruhan sebesar 4,48 berada pada kategori sangat tinggi. Secara deskriptif, nasionalisme memperoleh rerata tertinggi (4,53), disusul persatuan (4,46) dan etika demokrasi digital (4,45). Namun, tingginya skor tidak boleh langsung dibaca sebagai keberhasilan penuh pendidikan digital di madrasah. Skor tersebut lebih tepat dipahami sebagai modal sikap normatif yang kuat, sekaligus mengandung kemungkinan bias kepatutan sosial karena siswa cenderung memilih jawaban yang dianggap benar secara moral oleh sekolah.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kecenderungan etika demokrasi digital siswa sudah berada pada kategori sangat tinggi, tetapi tetap memerlukan penguatan melalui praktik pembelajaran yang konkret. Digital citizenship tidak cukup dipahami sebagai pengetahuan normatif tentang perilaku baik di internet, melainkan perlu diwujudkan dalam kemampuan menjaga hak dan tanggung jawab digital, menghargai perbedaan, serta berpartisipasi secara etis dalam ruang publik daring Ananto dan Ningsih (2023) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital di sekolah harus diarahkan pada pengalaman demokratis yang memungkinkan siswa memahami konsekuensi sosial dan etis dari tindakan digitalnya.

Tingginya skor nasionalisme menunjukkan bahwa siswa memiliki modal afektif yang kuat sebagai warga bangsa. Akan tetapi, nasionalisme dalam masyarakat digital tidak cukup dipahami sebagai kebanggaan simbolik. Nasionalisme perlu diterjemahkan menjadi perilaku menjaga nama baik bangsa, menghargai keragaman Indonesia, menolak konten yang merendahkan kelompok lain, dan tidak menyebarkan narasi yang memecah belah. Dalam kerangka civic disposition, nasionalisme yang sehat harus terhubung dengan kebiasaan berpikir kritis, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap

kepentingan bersama. Karena itu, hasil pada dimensi nasionalisme perlu dibaca sebagai peluang pedagogis untuk mengembangkan praktik kewargaan digital yang lebih konkret.

**Tabel 3.** Kategori Kecenderungan Siswa Berdasarkan Rerata Dimensi

Dimensi	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah
Etika demokrasi digital	64 siswa	36 siswa	0	0	0
Nasionalisme	71 siswa	29 siswa	0	0	0
Persatuan	63 siswa	35 siswa	2 siswa	0	0
Keseluruhan	65 siswa	35 siswa	0	0	0

Tabel 3 memperlihatkan bahwa 65 siswa berada pada kategori sangat tinggi dan 35 siswa pada kategori tinggi secara keseluruhan. Tidak terdapat siswa yang masuk kategori rendah atau sangat rendah. Namun, pada dimensi persatuan masih terdapat 2 siswa yang berada pada kategori sedang. Meskipun jumlahnya kecil, data ini tidak boleh diabaikan karena konflik digital sering berawal dari sebagian kecil perilaku yang dianggap sepele, seperti ejekan di grup kelas, penyebaran tangkapan layar, komentar sarkastik, atau pengucilan teman dalam percakapan daring. Artinya, pembinaan persatuan perlu tetap bersifat preventif, bukan hanya reaktif setelah konflik terjadi.

Kategori yang sangat tinggi perlu ditafsirkan secara kritis karena angket self report mengukur pernyataan sikap, bukan perilaku aktual ketika siswa berada dalam tekanan kelompok, arus viral, atau konflik digital. Siswa dapat menyatakan setuju untuk menolak hoaks dan ujaran kebencian, tetapi belum tentu memiliki keterampilan memeriksa sumber, mengenali manipulasi visual, atau menahan respons emosional ketika konten menyentuh identitas agama, daerah, atau politik. Dengan demikian, hasil yang tinggi tidak menutup adanya kerentanan. Justru, data ini menunjukkan bahwa madrasah memiliki modal nilai yang baik, tetapi masih membutuhkan latihan literasi kritis dan simulasi kasus agar sikap normatif berubah menjadi kebiasaan digital yang teruji.

**Tabel 4.** Indikator Terkuat dan Indikator yang Perlu Diperkuat

Dimensi	Indikator dengan rerata tertinggi	Rerata	Indikator yang perlu diperkuat	Rerata
Etika demokrasi digital	Menggunakan bahasa sopan dan santun di media digital	4,60	Tidak mudah terpengaruh ujaran kebencian di media sosial	4,23
Nasionalisme	Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia	4,70	Menolak konten digital yang dapat memecah belah bangsa	4,31
Persatuan	Kebersamaan antarsiswa penting untuk lingkungan harmonis	4,67	Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi	4,15

Tabel 4 menunjukkan bahwa indikator terkuat berada pada rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan rerata 4,70, kebersamaan antarsiswa dengan rerata 4,67, dan kesantunan bahasa digital dengan rerata 4,60. Sementara itu, indikator yang masih perlu diperkuat adalah kemampuan tidak mudah terpengaruh ujaran kebencian di media sosial dengan rerata 4,23, penolakan terhadap konten digital yang dapat memecah belah bangsa dengan rerata 4,31, dan kemampuan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dengan rerata 4,15. Pola ini menunjukkan bahwa siswa cenderung kuat pada aspek sikap positif yang bersifat afirmatif, seperti bangga, santun, dan menjaga kebersamaan, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek ketahanan kritis ketika berhadapan dengan konten digital yang provokatif.

Indikator yang masih perlu diperkuat menunjukkan bahwa siswa membutuhkan latihan literasi informasi yang lebih aplikatif. McGrew dan Kohnen (2024) menegaskan bahwa kemampuan menilai kredibilitas sumber, membandingkan informasi, dan memahami konteks digital merupakan bagian penting dalam mencegah penyebaran misinformasi. Heiss et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi

informasi media sosial berkaitan dengan kemampuan individu menghadapi kelebihan informasi dan kecenderungan menerima narasi yang tidak terverifikasi. Kops et al. (2025) juga menegaskan bahwa program pencegahan informasi palsu bagi anak muda perlu dirancang secara sistematis, bukan hanya melalui imbauan moral.

Indikator kesantunan bahasa digital yang tinggi menunjukkan adanya modal karakter yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran PPKn. Kesantunan bukan sekadar perilaku sopan secara formal, melainkan bagian dari etika demokrasi karena diskusi publik memerlukan penghargaan terhadap martabat orang lain. Dalam ruang digital, kata-kata yang ditulis siswa dapat tersebar, ditafsirkan ulang, dan memicu respons emosional. Oleh sebab itu, kemampuan menggunakan bahasa yang baik perlu dipadukan dengan kemampuan menyusun argumen. Guru PPKn dapat melatih siswa membedakan kritik dan hinaan, pendapat dan fitnah, humor dan perundungan, serta kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak orang lain. Dengan cara ini, kesantunan tidak berhenti pada larangan berkata kasar, tetapi berkembang menjadi keterampilan dialog demokratis.

Indikator tidak mudah terpengaruh ujaran kebencian memperoleh rerata 4,23. Nilai ini masih berada pada kategori sangat tinggi, tetapi menjadi nilai terendah pada dimensi etika demokrasi digital. Hal ini penting karena ujaran kebencian tidak selalu muncul dalam bentuk kalimat kasar yang mudah dikenali. Ujaran kebencian dapat dikemas dalam meme, potongan video, sindiran, label negatif, atau narasi yang menyudutkan kelompok tertentu. Siswa memerlukan kemampuan membaca konteks, memeriksa sumber, memahami tujuan konten, dan menunda respons emosional. Asnaria et al. (2022) menegaskan bahwa literasi digital berperan penting dalam mencegah penyebaran hoaks dan memperkuat karakter persatuan. Dengan demikian, pembelajaran etika digital perlu bergerak dari nasihat umum menuju latihan analisis konten yang konkret.

Kearifan lokal Bima menjadi penting karena ia menawarkan bahasa moral yang dekat dengan pengalaman siswa, tetapi efektivitasnya menghadapi ruang digital tidak dapat diasumsikan otomatis. Algoritma media sosial cenderung menonjolkan konten yang cepat menarik perhatian, emosional, dan mudah memicu reaksi. Dalam situasi tersebut, Maja Labo Dahu dapat berfungsi sebagai rem moral sebelum siswa membagikan konten yang merendahkan orang lain; Nggahi Rawi Pahu dapat mengikat ucapan digital dengan tanggung jawab nyata; sedangkan Tahompara Ndai Sura Dou Labo Dana dapat menantang dorongan mencari popularitas pribadi melalui konten provokatif. Tantangannya, nilai lokal sering diajarkan sebagai nasihat umum, sementara ruang digital bekerja melalui kecepatan, tekanan teman sebaya, dan ekonomi perhatian. Karena itu, nilai Bima perlu diterjemahkan ke dalam latihan konkret: verifikasi konten, jeda sebelum membagikan, kritik tanpa menghina, dan refleksi dampak sosial unggahan.

Dimensi nasionalisme memperoleh rerata tertinggi, yaitu 4,53. Indikator bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia memperoleh rerata 4,70, sedangkan indikator menolak konten digital yang dapat memecah belah bangsa memperoleh rerata 4,31. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebanggaan nasional sudah kuat, tetapi perlu diterjemahkan menjadi kemampuan menilai konten digital yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Nasionalisme digital tidak cukup diwujudkan melalui unggahan simbol negara atau ucapan hari besar nasional. Nasionalisme juga harus tampak dalam sikap tidak ikut memperolok budaya daerah lain, tidak menyebarkan stereotip, tidak merendahkan bahasa atau tradisi kelompok tertentu, dan tidak membagikan konten yang memancing permusuhan antarkelompok.

Dewantara et al. (2022) menunjukkan bahwa buzzer dan dinamika media sosial dapat memengaruhi opini publik terkait pilihan politik. Meskipun penelitian tersebut berada pada konteks yang berbeda, temuan itu relevan untuk menjelaskan bahwa ruang digital tidak netral. Konten yang diterima siswa dapat dibentuk oleh algoritma, kepentingan politik, ekonomi perhatian, atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, nasionalisme siswa harus disertai literasi media agar tidak mudah diarahkan oleh narasi yang tampak membela bangsa, tetapi sebenarnya menanamkan kebencian terhadap kelompok lain. Pendidikan nasionalisme di madrasah perlu menghindari pendekatan yang hanya

emosional, dan harus dikembangkan menjadi nasionalisme reflektif yang menghargai hukum, kemanusiaan, demokrasi, dan keberagaman.

Dimensi persatuan memperoleh rerata 4,46 dengan indikator kebersamaan antarsiswa sebesar 4,67. Data ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan kuat untuk menghargai harmoni di lingkungan sekolah. Namun, indikator mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi memperoleh rerata 4,15, lebih rendah dibandingkan indikator lain. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa siswa memahami pentingnya kebersamaan, tetapi masih perlu pembiasaan dalam situasi konkret yang menuntut pengendalian ego, pembagian peran, dan penyelesaian konflik. Dalam pembelajaran kelompok, misalnya, siswa perlu dilatih menghargai kontribusi teman, tidak mendominasi keputusan, tidak menyalahkan anggota kelompok di ruang digital, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah.

Persatuan dalam ruang digital tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarsiswa, tetapi juga dengan cara siswa memandang perbedaan sosial yang lebih luas. Nurgiansah et al. (2022) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dapat menjadi solusi resolusi konflik sosial. Bagi siswa madrasah, pendidikan multikultural dapat dikaitkan dengan nilai ukhuwah, penghargaan terhadap sesama warga bangsa, dan kesadaran bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Dalam praktik digital, siswa perlu belajar mengenali konten yang memperuncing identitas, menolak ajakan mengejek kelompok tertentu, dan menggunakan media sosial untuk memperluas solidaritas. Kecenderungan persatuan yang sangat tinggi menjadi modal penting untuk membangun budaya digital yang inklusif.

Pembahasan hasil penelitian perlu diarahkan pada perbedaan antarindikator, bukan hanya pada rekomendasi kelembagaan. Data menunjukkan bahwa indikator afirmatif seperti bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia (4,70), kebersamaan antarsiswa (4,67), dan kesantunan bahasa digital (4,60) lebih kuat daripada indikator resistif-kritis seperti tidak mudah terpengaruh ujaran kebencian (4,23), menolak konten pemecah belah bangsa (4,31), dan mengutamakan kepentingan bersama (4,15). Pola ini mengindikasikan bahwa siswa relatif mudah menyetujui nilai positif yang bersifat ideal, tetapi membutuhkan dukungan lebih kuat ketika harus menghadapi konten digital yang emosional, provokatif, atau bertekanan kelompok.

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui karakter ruang digital. Kebanggaan nasional dan kesantunan merupakan nilai yang sejak awal diperkuat dalam budaya sekolah dan madrasah, sehingga mudah dikenali sebagai jawaban moral yang diharapkan. Sebaliknya, ujaran kebencian dan konten pemecah belah sering hadir dalam bentuk yang tidak selalu eksplisit, misalnya meme, potongan video, sindiran, stereotip daerah, atau narasi yang seolah-olah membela agama dan bangsa. Karena itu, indikator yang lebih rendah bukan sekadar kelemahan sikap, tetapi menandai kebutuhan pada keterampilan analisis konten dan keberanian mengambil jarak dari arus kelompok.

Dalam perspektif PPKn, temuan ini memperlihatkan bahwa civic disposition siswa sudah cukup kuat pada aspek afektif, tetapi civic skill masih perlu diperkuat pada ranah verifikasi informasi, argumentasi demokratis, dan pengendalian respons digital. Pembelajaran PPKn dapat menghubungkan materi Pancasila, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, norma, persatuan, serta kebinekaan dengan studi kasus digital. Namun, guru tidak cukup memberikan larangan moral; siswa perlu dilatih membedakan kritik dan hinaan, fakta dan opini, humor dan perundungan, serta nasionalisme reflektif dan fanatisme identitas.

Nilai lokal Bima dapat menjadi jembatan antara norma Pancasila dan pengalaman sehari-hari siswa. Maja Labo Dahu dapat digunakan sebagai refleksi etis sebelum memberi komentar; Nggahi Rawi Pahu dapat dipakai untuk menilai konsistensi antara ucapan digital dan tanggung jawab sosial; sedangkan Tahompara Ndai Sura Dou Labo Dana dapat menjadi dasar musyawarah ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan kelas atau madrasah. Dengan cara ini, nilai lokal tidak menjadi tempelan simbolik, tetapi menjadi alat baca terhadap tindakan digital yang konkret.

Uraian mengenai guru, BK, OSIM, orang tua, dan media sosial madrasah dalam artikel ini perlu ditempatkan sebagai implikasi pedagogis, bukan temuan empiris langsung. Penelitian ini tidak mengukur variabel-variabel tersebut melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Karena itu, rekomendasi program harus bersifat hati-hati: madrasah dapat mengembangkan panduan etika grup kelas, latihan verifikasi informasi, mediasi konflik digital, dan produksi konten positif, tetapi efektivitasnya perlu diuji melalui penelitian tindakan, studi kualitatif, atau desain campuran.

Dengan pembacaan tersebut, kontribusi artikel ini menjadi lebih proporsional. Data survei menunjukkan adanya modal sikap yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan titik rawan pada ketahanan menghadapi ujaran kebencian, konten pemecah belah, dan kepentingan pribadi. Kearifan lokal Bima memberi perangkat etik untuk merespons titik rawan tersebut, sedangkan PPKn menyediakan kerangka kewargaan agar nilai lokal selaras dengan Pancasila, demokrasi, dan persatuan Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data utama berasal dari angket tertutup, sehingga belum menangkap proses internalisasi nilai melalui wawancara, observasi kelas, analisis percakapan digital, atau dokumentasi kegiatan madrasah. Kedua, desain cross sectional tidak dapat menjelaskan perubahan sikap dari waktu ke waktu. Ketiga, purposive sampling pada 100 siswa di satu madrasah membatasi generalisasi temuan. Keempat, instrumen belum diuji dengan EFA atau CFA, sehingga struktur faktor tiga dimensi masih perlu dikonfirmasi secara empiris. Kelima, rerata yang sangat tinggi perlu dibaca dengan mempertimbangkan social desirability bias. Keterbatasan tersebut justru menjadi dasar penelitian lanjutan agar nilai lokal Bima, etika demokrasi digital, nasionalisme, dan persatuan dapat diuji dengan data yang lebih kaya.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan etika demokrasi digital, nasionalisme, dan persatuan siswa MTsN 4 Bima berada pada kategori sangat tinggi dengan rerata keseluruhan 4,48 dan reliabilitas instrumen 0,941. Namun, temuan ini tidak boleh dibaca sebagai bukti final keberhasilan internalisasi nilai karena data berbasis self report berpotensi mengandung bias kepatutan sosial dan belum merekam perilaku digital aktual. Kontribusi utama artikel ini adalah menunjukkan bahwa nilai lokal Bima, khususnya Maja Labo Dahu, Nggahi Rawi Pahu, dan Tahompara Ndai Sura Dou Labo Dana, dapat digunakan sebagai kerangka etik kontekstual untuk membaca titik kuat dan titik rawan kewargaan digital siswa. Indikator terkuat berada pada kebanggaan nasional, kebersamaan, dan kesantunan bahasa, sedangkan indikator yang perlu diperkuat adalah ketahanan terhadap ujaran kebencian, penolakan konten pemecah belah, dan pengutamaan kepentingan bersama. Implikasi bagi PPKn adalah perlunya pembelajaran berbasis kasus digital, latihan verifikasi informasi, dialog demokratis, dan refleksi nilai lokal agar nasionalisme dan persatuan tidak berhenti pada sikap simbolik, tetapi hadir dalam praktik digital yang kritis dan bertanggung jawab. Penelitian lanjutan perlu menggunakan wawancara, observasi, portofolio digital, analisis media sosial, serta pengujian validitas konstruk untuk menjelaskan proses internalisasi nilai secara lebih mendalam.

## Referensi

- Ananto, P., & Ningsih, S. K. (2023). An examination of Indonesian teachers' and students' perception and level of digital citizenship. *Heliyon*, 9(8), e18987. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18987>
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanszil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting *Ksatria Bela Negara* comic through the Webtoon for the prevention and control of COVID-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Armedi, R., Fattachil 'Izza, A., Dilapanga, R. R., & Apriansyah, A. (2025). Internalization of educators' role in strengthening students' character amidst social media onslaught. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 10(2), 221–240. <https://doi.org/10.26618/jed.v10i2.17935>
- Asnaria, F. R., Muthali'in, A., Prasetyo, W. H., & Patmisari, P. (2022). The role of digital literacy in the spread of hoaxes on Instagram to strengthen the character of unity. *JED (Jurnal Etika*

- Demokrasi*), 7(3), 695–704. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i3.8084>
- Azis, A., Maftuhin, M., & Nugraha, D. M. (2021). Citizenship education in the COVID-19 era: How to become a digital citizen? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 207–216. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40833>
- Cahyono, C., Daniah, E., Rahmat, R., Masyitoh, I. S., & Romli, A. D. (2024). Developing students' civic responsibility using a blended learning model with an asynchronous system. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.67361>
- Chotimah, U., Kurnisar, K., Ermanovida, E., & Juainah, N. (2021). Building religious, honesty, discipline, and student curiosity characters in online HOTS-based citizenship education learning. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 118–126. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39088>
- Dewantara, J. A., Syamsuri, S., Wandira, A., Afandi, A., Hartati, O., Cahya, N., Sapitri, P., & Nurgiansah, T. H. (2022). The role of buzzers in social media in guiding public opinion regarding political choices. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 681–694. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i3.8103>
- Fernández-Prados, J. S., Lozano-Díaz, A., & Ainz-Galende, A. (2021). Measuring digital citizenship: A comparative analysis. *Informatics*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.3390/informatics8010018>
- Halimah, L., Romlah, O. Y., Heryani, H., & Setiawati, L. (2024). Navigating online learning for citizenship education through parenthood in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 90–97. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.57731>
- Hariyanti, H., Darmawan, C., Rahmat, R., & Anggraeni, L. (2025). Strengthening democracy through voter education for Generation Z: Challenges and collaborative solutions. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 10(1), 76–93. <https://doi.org/10.26618/jed.v10i1.16279>
- Heiss, R., Nanz, A., & Matthes, J. (2023). Social media information literacy: Conceptualization and associations with information overload, news avoidance, and conspiracy mentality. *Computers in Human Behavior*, 148, 107908. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107908>
- Japar, M., Casmana, A. R., Adha, M. M., & Fadhillah, D. N. (2024). Students' perspectives on civic education through digital citizenship in the virtual era. *European Journal of Educational Research*, 13(1), 89–102. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.13.1.89>
- Kops, M., Schittenhelm, C., & Wachs, S. (2025). Young people and false information: A scoping review of responses, influential factors, consequences, and prevention programs. *Computers in Human Behavior*, 169, 108650. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108650>
- McGrew, S., & Kohnen, A. M. (2024). Tackling misinformation through online information literacy: Structural and contextual considerations. *Journal of Research on Technology in Education*, 56(4), 665–686. <https://doi.org/10.1080/15391523.2023.2280385>
- Milenkova, V., & Lendzhova, V. (2021). Digital citizenship and digital literacy in the conditions of social crisis. *Computers*, 10(4), 40. <https://doi.org/10.3390/computers10040040>
- Nur, J., Syahrir, M., Sanjaya, D. B., Ya'kub, Y., & Jafar, S. A. (2023). The integration of Pancasila values in building students' character as an effort to prevent lost generation. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(3), 361–372. <https://doi.org/10.26618/jed.v8i3.11906>
- Nurgiansah, T. H., Wulandari, M. A., & Bety, C. F. (2022). Resolution of social conflicts through multicultural education. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 428–436. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i3.7577>
- Nurjanah, N., Abdulkarim, A., Komalasari, K., Bestari, P., & Suwandi, M. A. (2024). Critical literacy of young citizens in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 352–358. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.70232>
- Peart, M., Cubo-Delgado, S., & Gutiérrez-Esteban, P. (2022). Exploring the role of digital and socio-civic skills for promoting youth participation and digital citizenship. *European Journal of Educational Research*, 11(2), 697–709. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.11.2.697>
- Prasetyo, W. H., Naidu, N. B. M., Tan, B. P., & Sumardjoko, B. (2022). “It really needs to be given to students”: Digital citizenship understanding amongst student teachers—A qualitative NVivo analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 9–20. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.46888>
- Ruskialan, R., Ahmad, J. B., Suardi, S., & Syahrir, M. (2025). Analysis of the implementation of citizenship competence in the civics education curriculum at the junior high school level in Bima

- 
- Regency. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 10(2), 184–194. <https://doi.org/10.26618/jed.v10i2.18027>
- Saputri, R. M., & Marzuki, M. (2021). The role of parents and society in value education and civic education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 268–275. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.38871>
- Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2022). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 303–309. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.48285>
- Sunarso, S., Hidayah, Y., Firmansyah, A., & Arpanudin, I. (2024). Content analysis of Pancasila and civic education curriculum at the junior high school level in Indonesia: Philosophical perspectives in affirming civic identity. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 98–106. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.63161>
- Sutrisno, S., Sunarto, S., & Jumadi, J. (2023). Global citizenship education in the perspective of strengthening Pancasila student profiles. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 322–331. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.63983>
- Suyato, S. (2023). Engineering the development of democratic citizenship education curriculum in the global era: A few perspectives from theoretical frameworks. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 26–35. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.59915>
- Trisiana, A., Triyanto, T., Zakaria, G. A. N., Sakinah, S., & Arvinth, N. (2025). Promoting diversity tolerance among Indonesians through smart mobile civic media in citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1280>
- Vallès-Peris, N., Domènech, M., & Tirado, F. (2024). Digital citizenship at school: Democracy, pragmatism, and responsible research and innovation. *Studies in Educational Evaluation*, 80, 101314. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2023.101314>
- von Gillern, S., Korona, M., Wright, W., Gould, H., & Haskey-Valerius, B. (2024). Media literacy, digital citizenship, and their relationship: Perspectives of preservice teachers. *Teaching and Teacher Education*, 138, 104404. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104404>
- Wahidin, D., Utami, I. S., Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Digital democracy transformation in Indonesia: Opportunities, challenges, and future solutions. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 10(1), 15–42. <https://doi.org/10.26618/jed.v10i1.17001>